**Artikel.**

**ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENYEDIAANPENGEMBANGAN SMK BERBASIS POTENSI DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

***NEED ANALYSIS AND PROVISION OF SMK DEVELOPMENT***

***WITH DISTRICT POTENTIAL IN BANTAENG DISTRICT***

 **Oleh :ANDI ABDURRAHMAN**

**ABSTRAK**

ANDI ABDURRAHMAN 2016. Analisis Kebutuhan dan Penyediaan Pengembangan SMK Berbasis Potensi Daerah Kabupaten Bantaeng*.* (Dibimbing Oleh: Husain Syam dan Purnamawati). Kata Kunci : Pengembangan SMK berdasarkan Potensi daerah, sumber daya alam dan kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan daerah untuk pengembangan SMK berdasarkan Potensi daerah, sumber daya alam dan kearifan lokal dengan kondisi nyata dalam penyediaan SMK. Hasil analisis ini kemudian disusun menjadi kesimpulan yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi sebagai hasil (solusi) dari permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis dokumentasi yang diperkuat dengan wawancara terhadap berbagai pihak, berkenaan dengan kebutuhan SMK di Kabupaten Bantaeng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program keahlian yang dikembangkan di SMK cenderung *marketable*, tidak berdasarkan potensi daerah. Hanya sedikit tenaga lulusan SMK yang dapat diserap oleh industri di Kabupaten Bantaeng, dikarenakan sebagian besar industri masih menggunakan cara-cara tradisional, baik dalam pengetahuan maupun proses produksinya. Sebaran SMK di kabupaten Bantaeng, menumpuk pada daerah kecamatan tertentu dengan jumlah SLTP masih kurang sementara terdapat 1 kecamatan yang tidak memiliki SMK. Terdapat 11 SMK di kabupaten Bantaeng dengan 15 kelompok keahlian, 12 kelompok keahlian yang sesuai dengan potensi daerah (80%) dan 3 kelompok keahlian yang tidak sesuai dengan potensi daerah (20%). SMK di kabupaten Bantaeng banyak terkonsentrasi di Kecamatan Pa’jukukang dan Tompobulu. Dengan melihat kondisi tersebut Pemerintah kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga akan mengarahkan ke Akademi Komunitas dengan Kualifikasi Pendidikan *Vocasional* (Kejuruan) yang dibangun tahun ini selanjutnya diperkuat dengan pelatihan di Balai latihan Kerja Bantaeng (BLK) dengan sertifikat Kompetensi.

**PENDAHULUAN**

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU 17/2007) menetapkan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah:“Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.”Lebih jauh lagi, UU 17/2007 juga mencanangkan idaman kemajuan pada tahun 2045 sebagai berikut, yaitu: “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan. Ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. UU 17/2007 juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional*.*

 Berdasarkan pada 9 (sembilan) agenda prioritas dalam Nawacita setidaknya ada 3 (tiga) poin yang sesuai dengan program pengembangan pendidikan nasional, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 2) Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 3) Melakukan revolusi karakter bangsa. Dengan adanya Nawacita, maka program dan pengembangan pendidikan kejuruan harus merujuk pada perwujudan nawacita tersebut. Kesesuian tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dan pola pembiayaan kegiatan.

Kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan SMK. Pengembangan SMK kurang mendapat perhatian yang serius, hal ini dapat dilihat dari perbandingan keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan keberadaan SMK 60%:40%. Jika melihat kenyataan dilapangan, keberadaan tenaga kerja yang memiliki ijazah lulusan SMA ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SMK, padahal semestinya lulusan SMA dididik berdasarkan kurikulum yang dikondisikan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi.

 Melihat kondisi tersebut perlu adanya pengembangan sekolah kejuruan baik secara kualitas maupun kuantitas dengan target perbandingan perimbangan SMK banding sekolah umum SMA/MA mencapai rasio 70%:30%. SMK bertujuan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dengan membawa konsekuensi bahwa SMK dituntut mampu membekali lulusannya dengan seperangkat kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

 Kabupaten Bantaeng jumlah penduduknya yaitu sebesar 181.006 jiwa, jumlah penduduk tersebut merupakan potensi (SDM). Dari jumlah penduduk tersebut 31,93% tercatat memiliki tingkat pendidikan belum tamat SD; 42,30%, tamat SD; 15,47% tamat SLTP; 8,57% tamat SLTA dan sisanya tamat Perguruan Tinggi 1,73%. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng (2014) Profil Pendidikan (2014*)*. Hal ini menunjukkan bahwa Kebutuhan dan penyediaan SMK di Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan yang ada, hanya 5 SMK Negeri yang tersebar di 4 Kecamatan dan 3 SMK Swasta yang sama pada 1 Kecamatan dari 5 SMK Swasta yang ada di Kabupaten Bantaeng. untuk itu perlu adanya keselarasan antara kebijakan pengembangan daerah dan pengembangan potensi daerah serta didukung pula dengan peningkatan SDM. Penerapan kebijakannya adalah memprioritaskan adanya sekolah kejuruan yang dapat menampung sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) untuk memperoleh pendidikan sekolah kejuruan.Adapun data Potensi Daerah pada sumber daya alam tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah :

Tabel 1.2 Data Sumber Potensi Daerah Kabupaten Bantaeng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | SUMBER DAYA ALAM | KET |
| Pertanian | Perkebunan | Perdagangan | Perindustrian | Peternakan | Kehutanan | Perikanan |
| 1 | Bissappu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uluere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sinoa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bantaeng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Eremerasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tompobulu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pa’jukukang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gantarangkeke |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng (2014)

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah (SLTP) sebesar 24 sekolah tersebar di 8 Kecamatan dan Mandrasah Tsanawaiyah sebesar 25 sekolah tersebar di 7 kecamatan. Daya tampung untuk tingkat (SLTP) dan Mandrasah Tsanawaiyah berpusat pada Kecamatan Bantaeng, Bissappu dan Gantarangkeke. disisi lain, banyak potensi daerah di Kabupaten Bantaeng belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, potensi Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Perindustrian.

Penyebaran SMK Negeri yang ada di Bantaeng belum merata dan optimal dalam daya tampung pada setiap lulusan SLTP, karena Kecamatan Tompobulu, Bissappu dan Bantaeng hanya memiliki 1 SMK yang masing-masing dengan daya tampung SLTP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Untuk itu pemerataan SMK di Kabupaten Bantaeng perlu adanya analisis kebutuhan dan penyediaan pengembangan SMK berbasis potensi daerah. sehingga pengembangan SMK pada kabupaten Bantaeng tersebar secara merata sesuai dengan potensi kecamatan masing–masing. Dampak positif yang diperoleh adalah tercapainya peningkatan SDM, sehingga masyarakat akan terkonsentrasi pada aktivitas pengolahan sumber daya alam yang ada didaerahnya.

 Mengacu pada latar belakang masalah tersebut diatas, perlu dilakukan analisis kebutuhan berbasis potensi daerah sebagai dasar pengembangan sekolah kejuruan. Selanjutnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kebutuhan daerah untuk pengembangan SMK di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana mengembangkan SMK berdasarkan potensi daerah, sumber daya alam dan kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng ?
3. Bagaimana menentukan lokasi pembangunan SMK berdasarkan analisis kebutuhan ?

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kebutuhan daerah untuk pengembangan Sekolah Kejuruan yang meliputi: minat calon siswa, pasar tenaga kerja dikaitkan dengan potensi Daerah di Kabupaten Bantaeng;
2. Menganalisis potensi daerah pegembangkan SMK berdasarkan potensi daerah, sumber daya alam dan kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng;
3. Menganalisis lokasi pembangunan SMK Berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan jumlah siswa SLTP, pasar tenaga kerja dan dunia usaha dan indutri di Kabupaten Bantaeng.

Hasil dari penulisan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantaeng dalam merencanakan sarana pendidikan khususnya SMK. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam merencanakan penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kabupaten Bantaeng;
3. Bagi Masyarakat, dapat menambah wawasan masyarakat dalam memilih dan menentukan alternatif jenis pendidikan di masa datang.
4. Manfaat Teoritis
5. Bagi Institusi sebagai bahan referensi dalam pengembangan tesis;
6. Sebagai bahan kajian bagi penelitian pendidikan kejuruan selanjutnya.

**Tinjauan Pustaka**

Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia kedunia peradaban. Juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman. Pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik dalam membantu subjek didik berkembang ketingkat yang normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif (Muhadjir, 2003:6).

1. **Jenjang Pendidikan**

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang endidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Di akhir masa pendidikan dasar selama 6 (enam) tahun pertama (SD/MI), para siswa harus mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN) untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs) dengan lama pendidikan 3 (tiga) tahun.

Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Pendidikan dasar berbentuk: (1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya ( UU No.20 Tahun 2003)

Pendidikan menengah diselenggarakan ntuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat.Pendidikan menengah (sebelumnya dikenal dengan sebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar dan terdiri atas: (1) Pendidikan menengah umum, dan (2) Pendidikan menengah kejuruan.Satuan penyelenggara pendidikan menengah terdiri atas: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. ( UU No.20 Bab VI Tahun 2003)

1. **Jenis Pendidikan**

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 disebutkan jenis pendidikan termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. jalur pendidikan terdiri atas: (1) Pendidikan formal; (2) Non formal, dan (3) Informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas: (1) Pendidikan dasar; (2) Pendidikan menengah; (3)

1. ***Location Quotient*  (LQ)**

*Location Quotient* (LQ) adalah membandingkan besarnya peranan sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat daerah di atasnya. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor non basis (Retno, 2011) Secara umum metode ini menunjukkan lokasi pemusatan atau basis aktivitas. LQ dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber pertumbuhan regional, menganalisis kecenderungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil-hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam lingkup daerah himpunannya. Analisis LQ berguna untuk membantu menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan melihat kemampuan daya saing komoditas antar daerah atau dapat juga digunakan melihat sektor unggulan suatu wilayah.

1. **Pengembangan Pendidikan Kejuruan**

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah: (1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan dunia usaha lainnya sebagai tenaga kerja ditingkat menengah sesuai dengan kompetensi, dalam program keahlian yang dipilihnya; (2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam kompetensi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Di Indonesia, antara pendidikan kejuruan, vokasi dan professional dibedakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan sebagai berikut; (1) Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. (2) Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. (3) Program Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

1. **Pengembangan Daerah**

Pengembangan daerah dilakukan melalui rangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dan dilangsungkan secara terus menerus selama kurun waktu tertentu. kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang diantaranya adalah pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat.

1. Peningkatan sumber daya manusia di daerah.

Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat didaerah. Namun demikian, kualitas manusia dikawasan-kawasan tertinggal umumnya masih dibawah rata-rata kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standard kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu, pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi daerah, bukan oleh pendekatan yang bersifat *uniform*. Strategi pembangunan manusia dimasa mendatang harus mampu mengidentifikasi jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat menempatkan tenaga kerja dan lulusan terdidik dalam pasar peluang kerja yang senantiasa menuntut adanya peningkatan keahlian.

1. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah.

Struktur kelembagaan dana aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun propinsi dan kabupaten juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerah sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini daerah lebih kepada“menunggu” petunjuk dari Pusat. Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya. Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang disetiap propinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan aparat daerah dalam untuk mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber daya alam, manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

1. Pelayanan masyarakat yang efisien

Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia didaerah masih rendah. Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan didaerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Rencana tata ruang daerah merupakan bentuk-bentuk kerangka komitmen publik (makro) jangka panjang tentang arah pengembangan daerah dan cara-cara penyelenggaraan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam pengembangan tata kota yang optimal dan efesien.

1. **Teori Lokasi**

Manfaat dari teori tersebut diatas adalah: pergerakan kota merupakan aktivitas yang ada dalam ruang kota, baik ekononi maupun jasa pelayanan umum, termasuk diantaranya urban/penduduk kota dan keberadaan fasilitas sarana prasarana pendidikan.

1. **Potensi Daerah Bantaeng**

Berdasarkan hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 nilai, PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 2.950 milyar rupiah. Jika dibanding dengan nilai PDRB tahun 2013 sebesar 2.536 milyar rupiah maka terjadi kenaikan sebesar 25,2 persen. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sedangkan pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi-padi-palawija. Luas panen tanaman padi akhir Tahun 2014 sebesar 17.038 hektar sedangkan produksinya tercatat 98.125 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5,75 ton/hektar. untuk sektor perkebunan, Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Selanjutnya produksi komoditi andalan sector perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 antara lain kopi 1.495 ton, kapok 1.390 ton, cengkeh 149 ton dan kakao 2.790 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2014).

**HASIL PENELITIAN**

Penelitian melakukan Tahap Analisa kebutuhan dan penyediaaan pengembangan SMK berbasis potensi daerah kabupaten Bantaeng dengan melakukan validasi terhadap instrumen kisi materi wawancara dan Dokumentasi yang telah disusun dengan melibatkan 2 (dua) orang ahli. Validasi para ahli materi dilakukan untuk melihat validitas instrumen peneliti yang mencakup isi pada semua instrumen materi yang telah disusun untuk dikembangkan lebih lanjut. Hasil validasi para ahli digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap instrumen materi penelitian. Hasil Analisis LQ Potensi komoditi unggulan tiap kecamatan Terhadap Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng merupakan pusat perdagangan sedangkan untuk kawasan industri kecamatan Pa.jukukann sebagai rujukan untuk industri- industri kedepannya dan untuk kecamatan yang paling menonjol dalam bidang pertanian adalah Bissappu, Eremerasa dan Sinoa. Berdasarkan tabel 4.15 poetensi daerah menurut kecamatan Analisis LQ :

|  |
| --- |
| Tabel 4.15 Potensi Daerah menurut Kecamatan |
| No. | Kecamatan | Potensi |
| (1) | (2) |
| 1. | Bissappu | Perkebunan,Perdagangan,Pertanian,Perikanan |
| 2. | Uluere | Perkebunan, Kehutanan |
| 3. | Sinoa | Pertanian, Peternakan,Perindustrian |
| 4. | Bantaeng | Perdagangan, Perindustrian,Pertanian |
| 5. | Eremerasa | Pertanian, Perindustrian, Kehutanan  |
| 6. | Tompobulu | Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan |
| 7. | Pa’jukukang | Perdagangan, Perindustrian, Peternakan, Perikanan |
| 8. | Gantarangkeke | Perkebunan, Perdagangan, Peternakan |
| *Diolah dari Bantaeng Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik, 2014* |
|  |

Kelompok Keahlian Teknologi dan Rekayasa, mendominasi kelompok keahlian yang ada di SMK se kabupaten Bantaeng (33%), disusul Teknologi Agrobisnis Pertanian (26%) dan Kesehatan (20%), Sementara menurut PDRB kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 2010-2014 sektor Pertanian memberikan kontribusi yang dominan (34,08%), disusul Konstruksi (17,39%). Hal ini sangat memungkinkan peningkatan SMK dengan Bidang Keahlian Teknologi Pertanian yang memberikan andil dalam peningkatan PDRB kedepannya dengan beberapa aspek kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng Yaitu: (1) revitalisasi dengan menekankan pada aspek Spektrum Dasar Kompetensi Kejuruan SMK dengan jurusan yang sesuai kearifan lokal yang ada di kecematan tersebut. (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantaeng membuat kerjasama MoU antara SMK Teknologi Pertanian dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) sehingga dalam praktek kerja industri dapat tersalurkan sesuai dengan kompetensi kejuruan masing-masing. (3) Pemerintah kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Pemuda Dan Olah Raga, membuka Sentra kewirausahaan hasil praktek SMK Pertanian dan Agrobisnis dengan memanfaatkan Unit Produksi yang ada di SMK. Sehingga masyarakat mengetahui hasil yang peroleh oleh siswa selama belajar 3 tahun di SMK.

Kesesuaian SMK Terhadap Potensi Kecamatan Di Kabupaten Bantaeng terdapat 3 kelompok keahlian yang tidak sesuai dengan potensi daerah dari total 15 kelompok keahlian (20%) dan 12 kelompok keahlian yang sesuai dengan potensi daerah (80%). Meskipun banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bantaeng dibangun (didirikan) dengan membuka program keahlian yang sebagian sudah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, namun belum sepenuhnya dapat menampung semua potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng, misalnya program keahlian yang dapat menyiapkan untuk mengolah produksi hasil pertanian dengan Jurusan Pasca Panen dan Ekowisata Pegolahan Benih yang melimpah, program keahlian untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang penambangan.

**Kesimpulan**

Hasil kajian kebutuhan dan penyediaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bantaeng disimpulkan beberapa hal, antara lain:

Terdapat 16 kelompok keahlian yang sesuai dengan potensi wilayah (62%) dan 3 kelompok keahlian yang tidak sesuai dengan potensi Daerah (38%) dari total 19 kelompok keahlian. Meskipun banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bantaeng dibangun (didirikan) dengan membuka program keahlian yang sebagian besar sudah sesuai dengan potensi Daerah Bantaeng, namun belum sepenuhnya dapat mengcover semua potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng, misalnya program keahlian yang dapat menyiapkan untuk mengolah produksi rumput laut yang melimpah.

 Potensi Kearifan Lokal yang dapat mendukung pengembangan kompetensi Kabupaten Bantaeng adalah pada sektor pertanian yang memberikan banyak konstribusi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2014 sebesar 34,08 persen. Untuk SMK dengan kompetensi keahlian Agrobisnis dengan Jurusan Pasca Panen dan Ekowisata Pegolahan Benih dapat memberikan andil dalam peningkatan PDRB tahun selanjutnya. SMK membuka program keahlian yang sudah sesuai dengan potensi daerah disekitarnya (kecamatan) 80%, yang tidak sesuai dengan potensi daerah sekitarnya 20 %. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Bissappu dan Bantaeng perlu adanya pembangunan USB dengan Pertimbangan Jumlah Siswa, SMK dan DU/DI serta kearifan Lokal.

**B Saran**

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebutuhan dan penyediaan SMK di Kabupaten Banateng. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat sedikit mengurai masalah pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat memenuhi tenaga kerja bagi dunia usaha/dunia industri lokal dan dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun rekomendasi sebagai hasil dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Perlu strategi dan kebijakan untuk dapat memasyaratkan program keahlian SMK yang merupakan program keahlian yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah, sehingga masyarakat (siswa) tertarik dan mau menekuni program keahlian tersebut untuk memenuhi program pemerintah Pusat 30% : 70%., Membangun Unit Sekolah Baru (USB) hendaknya perlu menganalisis dalam pengembangan sekolah, karena itu pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantaeng) perlu mengatur pendirian Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK Kabupaten Bantaeng dengan melihat potensi Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim.2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)*

 .2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.*Jakarta: Sekretariat Negara.

Bappeda Kabupaten Bantaeng. (2014).*Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng Tahun 2014*. Bantaeng.

Bourne, Larry S. 1982. *Internal Structure of the City: Reading on Space and*

Bungin, urhan. 2008. *Metodologi* Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Clarke, L. and Winc, C. (2007). *Vocational Education International Approaches, Developments and Systems.New York: Routledge*.

Daldjoeni. N. 1992. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni ITB

Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2002.(2003). *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Depdiknas, (2006), *Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2008-2013*, Depdiknas, Jakarta.

Direktorat Pembinaan SMK. 2015.*Petunjuk Teknis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015.*Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Dirjen Penataan Ruang, (2002). *Pengembangan Wilayah dan Kawasan Perkotaan Dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah.Environment*. New York : Oxford University Press

Gary. R, Morrison, Steven M, Ross, Jerrold E Kemp : *Designing Effective Instruction,* *Third Edition John Wiley and Sons, inc printed in the USA* 2001.

Henry dan Thompson dalam Berg, G. A. 2002. *Why Distance Learning? Higher Education Administrative Practices.* Westport: Praeger Publishers. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9> .agenda.prioritas.jokowi-jk.

Indra Djati Sidi. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar; Mengapa Dengan Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina Kerja Sama dengan Logos Wacana Ilmu.

Iskandar Mirsa.2008. *Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Brebes.* Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Iswanto,Hadi. 2012. Pendidikan Kejuruan, <http://hadiyanuariswanto.wordpress.com>. Diakses 25 Februari 2013).

 Jakarta.

Kaufman, et.al. 1979. *Need Assessment, Concept and Aplication*. New Jersey: Englewood Cliffs, Educational Technology Publications.*Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.*Jakarta: Sekretariat Negara.

Kurniawan Tatang. 2011. Evaluasi Need Assessment, *Kajian Pustaka Evaluasi Need Assesment Dalam Pembelajaran Teknologi Informasi Pendidikan Kejuruan*, (<http://tatangkurniawan77.wordpress.com>, Diakses 16 Mei 2011)

Riyadi, M.M.D. 2000. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*. Paper disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000.

Slamet, PH. 2013. *Pengembangan SMK Model untuk masa Depan*. Universitas Negeri Yogyakarta.

 ,PH, 1994 *16 Teori Pendidikan Kejuruan dalam Prosser and Allen, 1925*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004

Sugiyono. 2005. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, Acc, (1995). *Relevansi Pendidikan*, Penerbit Balitbang Depdikbud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem.